



## KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNDANG-UNDANG ASN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

dr. Galianti Prihandayani, Sp.KJ. M.A.R.S

Direktur OSDM, Pendidikan dan Penelitian







## **CURICULUM VITAE**



- Nama: dr. Galianti Prihnadayani, Sp.KJ. M.A.R.S
- Jabatan: Direktur OSDM, Pendidikan dan Penelitian
- Tempat/Tanggal Lahir: Pendopo/ 28 September 1973
- Pendidikan : PPDS 1 Ilmu Kedokteran Jiwa, S2 Magister Administrasi Rumah Sakit
- Pengalaman Kerja :
  - Dr PTT Puskesmas Limo Depok (2001 sd 2004)
  - Dr Umum RSJ Dr. Soeharto Heerdjan (2005 2011)
  - Psikiater RSJ Dr. Soeharto Heerdjan (2011 2017)
  - Kepala Bidang Medik RSJ Dr. Soeharto Heerdjan (2017 sd 2019)
  - Direktur SDM dan Pendidikan RSJ Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (2019 sd 2020)
  - Direktur SDM, Pendidikan dan Umum RSJ Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta (2020 sd 2023)
  - Direktur OSDM, Pendidikan dan Penelitian RS Soeharto Heerdjan Jakarta (2023 sd sekarang)







## Arah Pembangunan Kesehatan dalam Visi Misi Presiden 2025 - 2029

#### Dalam 8 Misi Asta Cita

- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
  - Penguatan Sistem Peningkatan Kualitas
    SDM
  - Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional
  - Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi
  - Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
  - Meningkatkan Prestasi Olahraga



#### Dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Win

Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten

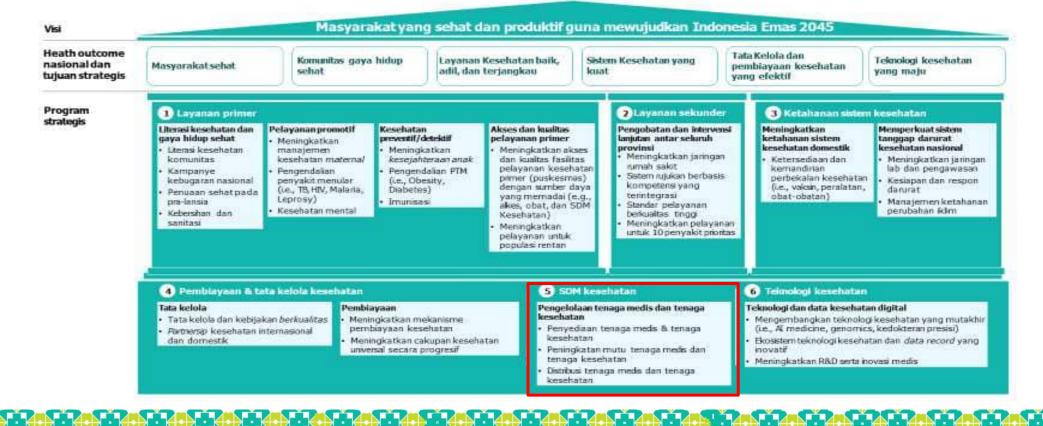
#### **Dalam 17 Program Prioritas**

Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat



# RENCANA INDUK BIDANG KESEHATAN, yang merupakan penerjemahan dari RPJMN untuk sector kesehatan







## Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis



## Tujuan 1 : Masyarakat sehat di setiap siklus hidup

- SS 1.1: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia
- SS 1.2: Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

## Tujuan 2: Masyarakat berperilaku hidup sehat

SS 2.1: Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat

#### Tujuan 3 : Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau

- SS 3.1: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
- SS 3.2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan

#### **VISI**

#### Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045

#### MISI1:

Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup

#### MISI 2:

· Membudayakan gaya hidup sehat

#### MISI 3:

 Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau

#### **MISI 4:**

 Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive

#### MISI 5:

 Menguatkan tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan

#### MISI 6:

Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju

#### **MISI 7:**

 Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

## Tujuan 4 : Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan responsif

 SS 4.1: Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan

#### Tujuan 5 : Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif

**SS 5.1**: Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah

• SS 5.2 : Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan

#### Tujuan 6: Teknologi Kesehatan yang Maju

- SS 6.1: Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan
- SS 6.2 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas uji klinis

## Tujuan 7: Kementerian Kesehatan yang mampu menjadi *learning organization*

 SS 7.1: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan





#### **VISI**

#### MASYARAKAT YANG SEHAT DAN PRODUKTIF UNTUK INDONESIA EMAS 2045

**Angka Harapan Hidup** 

Angka Harapan Hidup Sehat (HALE)

**UHC Service Coverage Index** 

Tujuan 1: Masyarakat sehat di setiap siklus hidup

SS 1.1 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia

- 1) Angka Kematian Ibu
- 2) Angka Kematian Balita
- 3) Prevalensi Stunting
- 4) Kabupaten/Kota yang mencapai target kekebalan kelompok (%)
- 5) Angka harapan hidup sehat pada umur 60 tahun (HALE60)

SS 1.2: Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

- 6) Persentase Depresi pada usia >= 15 Tahun
- 7) Angka Populasi Bebas PTM
- 8) Angka populasi bebas PM
- 9) Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Tujuan 2: Masyarakat berperilaku hidup sehat

SS 2.1 : Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat

- 10) Nilai literasi kesehatan
- 11) Tingkat aktivitas fisik
- 12) Cakupan STBM
- 13) Prevalensi Obesitas

Tujuan 3 : Layanan Kesehatan yg berkualitas, baik, adil dan terjangkau

SS 3.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes

- 14) Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai standar
- Persentase faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen, BMHP) sesuai standar
- 16) Persentase faskes mencapai akreditasi paripurna
- 17) Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan
- 18) Persentase belanja Kesehatan *out of* pocket
- 19) Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif

SS 3.2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan

20) Rasio Nakes dan Named terhadap populasi

Tujuan 4 : Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif

SS 4.1: Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan

- 21) Persentase jenis obat (termasuk vaksin) yang dapat diproduksi secara domestic
- 22) Persentase jenis alkes yang dapat diproduksi secara domestik
- 23) Indeks alat Kesehatan memenuhi standar
- 24) Nilai IHR dalam JEE
- 25) Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

Tujuan 5 : Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif

SS 5.1: Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah

26) Persentase target kesehatan nasional selaras di tingkat daerah

SS 5.2 Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan

27) Ratio belanja kesehatan per kapita terhadap

28) Skala investasi di sektor kesehatan

Tujuan 6: Teknologi Kesehatan yang Maju

SS 6.1: Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan

- 29) Persentase fasyankes terintegrasi SIKN
- 30) Persentase propulasi yang menggunakan SIKN

SS 6.2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas uji klinis

- 31) Peningkatan Kapabilitas Riset Kesehatan di Indonesia
- 32) Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan

Tujuan 7: Kementerian Kesehatan yang mampu menjadi *Learning Organization* 

SS 7.1: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

33) Indeks Tata Kelola Kementerian Kesehatan



## Program unggulan transformasi SDM Kesehatan

## Kemenkes RS Soeharto Heerdjan

## **Indonesia**

## **Peningkatan Jumlah**



Pendidikan dokter spesialis dengan mekanisme **Hospital based** 



Meningkatkan kuota pendidikan pada kedokteran, spesialis, serta prodi-prodi langka



Memperbanyak kuota jalur beasiswa bagi dokter, dokter gigi, serta nakes lainnya melalui program beasiswa, afirmasi dan tugas belajar

#### **Pemenuhan dan Pemerataan**



Rekrutmen CASN (PNS/PPPK) pada institusi kesehatan (Puskesmas, RS, Labkes, dll sesuai lokus rekomendasi Kemenkes



Penempatan tenaga kesehatan penerima 10.000+ beasiswa hingga tahun 2024 sesuai lokus rekomendasi Kemenkes



Kemudahan regulasi diaspora kesehatan WNI lulusan luar negeri untuk mendukung ketersediaan tenaga kesehatan

## Peningkatan mutu



**Fellowship** untuk meningkatkan kompetensi spesialistik



**Pelatihan kesehatan** dalam rangka peningkatan dan pemantapan kompetensi



Akreditasi Penyelenggara Pelatihan



**Transfer ilmu dan teknologi diaspora** dengan nakes puskesmas dan RS pemerintah



CPD/P2KB



#### REGULASI APARATUR SIPIL NEGARA

Bab I: Ketentuan Umum

Bab II: Asas, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku

Bab III : Jenis dan Kedudukan Bab IV : Fungsi, Tugas dan Peran

Bab V: Jabatan ASN → Manajerial dan Non Manajerial (JF dan

Pelaksana)

Bab VI: Hak dan Kewajiban

Bab VII: Kelembagaan

Bab VIII: Manajemen ASN (Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, pemberhentian)

Bab IX : Pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara

Bab X : Organisasi

Bab XI : Digitalisasi Manajemen ASN

Bab XII: Penyelesaian Sengketa

Bab XIII : Larangan

Bab XIV: Ketentuan Penutup





Pasal 26
Ayat (2) huruf d. pengawasan penerapan Sistem Merit
Sistem Merit diselenggarakan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

"Prinsip meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus





## **REGULASI TERKAIT PNS**

No	Peraturan
1.	Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan
2.	Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
3.	Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil
4.	Peraturan BKN No 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional
5.	Peraturan BKN No. 4 tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS dan Penjelasannya



## DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN





## Undang- Undang No 17/2023 Tentang Kesehatan (Pasal 258 ayat 1 dan 2)

- □ bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatan mutu Tenaga Medis dan Kesehatan, Tenaga dilakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukuna kesinambungan dalam menjalankan praktik,
- bahwa Pelatihan dan/ atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat

## PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

#### Pasal 670

#### Penyelenggaraan pelatihan dilakukan berdasarkan:

- a. pengkajian kebutuhan; dan
- b. kurikulum terstandar.

#### Pasal 672

- 1) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
  - a. perencanaan; dan
  - b. standardisasi mekanisme penyelenggaraan.
- Kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan melalui seminar, lokakarya/workshop, bimbingan teknis, coaching, mentoring, dan/atau kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 673

- 1) Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dapat digunakan untuk pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi melalui sertifikasi pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi.
- 2) Sertifikasi pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dikelola melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

#### Pasal 674

Dalam rangka menjamin kualitas dan keberhasilan penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan evaluasi.





## DASAR HUKUM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

#### **UU NO 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN**

#### PP 17 TENTANG MANAJEMEN ASN

## Pasal 49

(1) Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. 203

- Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yg sama dengan memperhatikan hasil penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- PPK wajib menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi

205

 Rencana pengembangan kompetensi dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan Instansi pemerintah







## UU No 36 tahun 2014

#### Pasal 30

- Pengembangan Nakes bertujuan untuk meningkatkan mutu dan karier Nakes
- Pengembangan Nakes dilakukan melaui Pendidikan dan Pelatihan serta kesinambungan dlm menjalankan praktik
- □ Dalam rangka pengembangan Nakes, Kepala Daerah dan Pimpinan Fasyankes bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Nakes



#### Pasal 31

- □ Pelatihan Nakes dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
- □ Pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Kompetensi serta diselenggarakan oleh Institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi





## Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

#### Pasal 61

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karier Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 76

- (1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat dilakukan pada prapenugasan dan/atau di dalam penugasan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat d-ilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.





#### KOMPETENSI ASN diterapkan untuk menjadi role model

#### KOMPETENSI MANAJERIAL

Diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan

PEREKAT BANGSA

ORIENTASI PADA HASIL



#### KOMPETENSI TEKNIS

Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis:

21

#### KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

Diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.





## STRATEGI PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN





Setiap penduduk memperoleh akses terhadap tenaga kesehatan yang berkualitas



## Jenis Peningkatan Kompetensi



## Metode Peningkatan Kompetensi

#### Pemenuhan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan sesuai kebutuhan teknis kesehatan **Pelatihan Teknis** Mengacu pada kurikulum terstandar. Kesehatan Diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi Mendapatkan sertifikat bernilai SKP Pemenuhan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan sesuai tuntutan kebutuhan organisasi kesehatan. **Pelatihan Penunjang** Mengacu pada kurikulum terstandar Kinerja Organisasi Diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi Mendapatkan sertifikat bernilai SKP atau tanpa SKP Seminar/Konferensi **Bimbingan Teknis** Workshop Peningkatan Magang **Mentoring** Coaching Kompetensi Sosialisasi dll Lainnya

#### Klasikal

- Metode **pembelajaran konvensional**
- peserta dan pelatih bertemu secara langsung di dalam kelas
- Pelaksanaannya harus memperhatikan komponenkomponen yang dipersyaratkan pada kurikulum

#### **Digital**

- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
- terintegrasi melalui platform pelatihan

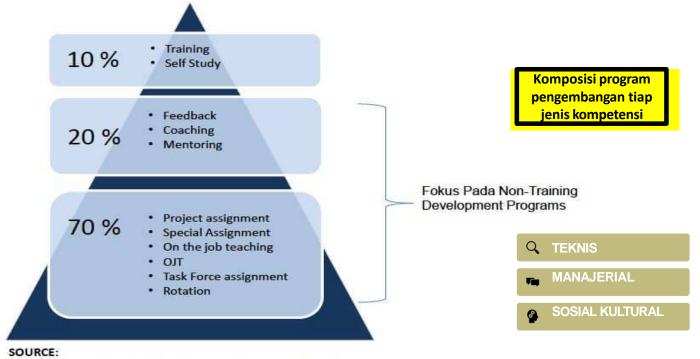
#### **Blended**

- Kombinasi metode klasikal dan digital
- Teori melalui digital, sedangkan penugasan dan praktek lapangan melalui klasikal





#### PENDEKATAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM



Assignments - Other People - Coursework: Comparison Six Lessons of Experience Studies by Cynthia McCauley Center for Creative Leadership - 2013





#### PERUBAHAN PARADIGMA BELAJAR SEKTOR PUBLIK



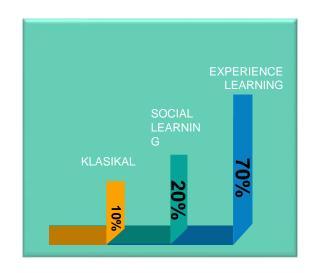
Perubahan dari Training and Development ke Learning and Development



Pergeseran dari Orang yang memberikan pelatihan (instruktur-lead) kepada Pelajar dan Dampak belajar pada kinerja mereka



Variasi kegiatan pengembangan kompetensi, selain instruktur-lead (diklat, workshop dan seminar) ke assignment/workplace/experiential learning serta juga social learning dalam bentuk pembimbingan (coaching dan mentoring)







## **Model Pengembangan Kompetensi ASN**

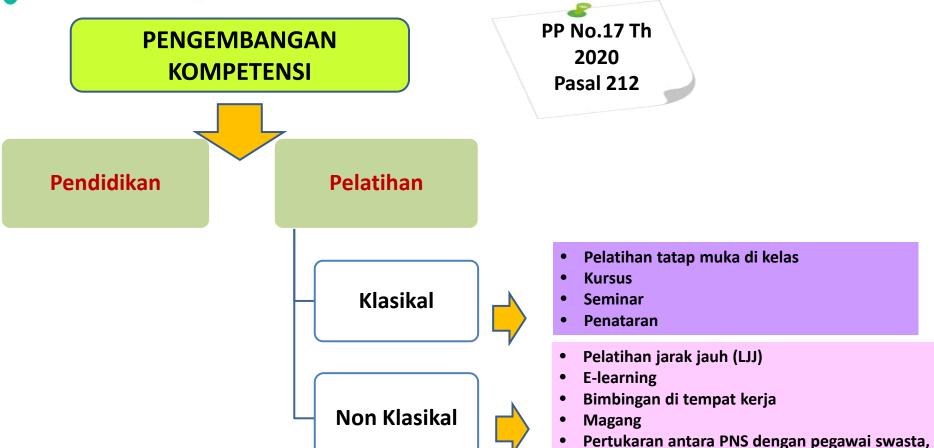






### KEBIJAKAN PELATIHAN





dikoordinasikan oleh LAN dan BKN





## **TERIMA KASIH**

